



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2024 - 2026



**BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KAPUAS**

**PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
JL. TAMBUN BUNGAJ NO.53A
KUALA KAPUAS 73516**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa sehingga pada saat ini Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Renstra Bappelitbangda) Kabupaten Kapuas Tahun 2024 - 2026 dapat disusun merupakan pedoman penyelenggaraan pelayanan pemerintah daerah dalam sinergi langkah-langkah kebijakan, program dan kegiatan antara Pemerintah Kabupaten Kapuas dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas.

Renstra Bappelitbangda Kabupaten Kapuas Tahun 2024 - 2026 memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan yang diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kapuas Tahun 2024 - 2026. Harapan Renstra Bappelitbangda Kabupaten Kapuas Tahun 2024 - 2026 merupakan dokumen formal dalam sistem penyelenggaraan pelayanan Perangkat Daerah (PD) khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Renja Bappedalitbangda) Kabupaten Kapuas setiap tahun selama periode Renstra Bappelitbangda berjalan.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kapuas yang telah bekerja dengan itikad dan dedikasi yang baik sehingga terselesainya penyusunan Dokumen Renstra Bappelitbangda Kabupaten Kapuas Tahun 2024 - 2026.

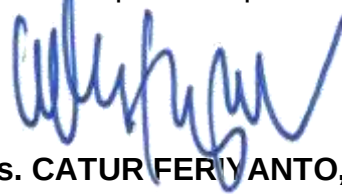
Terima kasih pula atas segala masukan dan saran semua pihak yang sangat bermanfaat sehingga menjadi inspirasi dan motivasi untuk

perbaikan dalam penyusunan Dokumen Renstra Bappelitbangda Kabupaten Kapuas Tahun 2024 - 2026.

Demikian, semoga Renstra Bappelitbangda Kabupaten Kapuas Tahun 2024 – 2026 dapat dimanfaatkan sebagai dokumen untuk menetapkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan akuntabilitas di Kabupaten Kapuas.

Kuala Kapuas,

Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Kapuas,



Drs. CATUR FERİYANTO, MT
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19650212 199003 1 017

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD	
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Bappelitbangda Kabupaten Kapuas.....	8
2.2. Sumber Daya Bappelitbangda Kabupaten Kapuas .	20
2.3. Kinerja Pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Kapuas	28
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Kapuas	29
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Kapuas	31
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1 Tujuan dan Sasaran	32
BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN.....	34
BAB VI RENCANA PROGRAM KEGIATAN, DAN PENDANAAN .	37

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN ...	62
--	-----------

BAB VIII PENUTUP	64
-------------------------------	-----------

LAMPIRAN	
-----------------	--



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, bahwa sesuai dengan kewenangannya, daerah menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Pemerintah daerah harus menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk pembangunan 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk pembangunan 5 tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk pembangunan tahunan sesuai tahapan dan tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Sebagai dokumen perencanaan jangka menengah, Pemerintah Kabupaten Kapuas telah menyusun dokumen RPJMD Kabupaten Kapuas Tahun 2018–2023 pada masa pemerintahan Bupati Ir. Ben Brahim S. Bahat, M.M., M.T dan Wakil Bupati Drs. H. M. Nafiah Iknor, M.M, yang akan berakhir pada tahun 2023.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-undang, pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan serentak secara nasional pada Tahun 2024. Bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada Tahun 2023 atau pada Daerah Otonom Baru (DOB), sehingga diinstruksikan Bupati/Wali kota yang masa jabatannya berakhir Tahun 2023, untuk Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana



Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala PD untuk menyusun Renstra PD Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 dan Renstra PD Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 ditetapkan oleh kepala daerah dengan Perkada.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renstra Bappelitbangda Kabupaten Kapuas tahun 2024-2026 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan



Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang



Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru(DOB);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);



19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021–2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 102);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2005–2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2006 Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kapuas Tahun 2019–2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2019 Nomor 52);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2018–2023; dan
24. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2024-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Bappelitbangda Kabupaten Kapuas adalah sebagai pedoman bagi seluruh komponen/aparatur



Bappelitbangda Kabupaten Kapuas dalam melaksanakan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan dan juga sebagai dasar perencanaan tahunan, dan untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Renja guna menghasilkan perencanaan yang berkesinambungan, sinergis, terpadu, akuntabel dan berkualitas.

Tujuan Rencana Strategis (Renstra) Bappelitbangda Kabupaten Kapuas tahun 2024-2026 adalah :

1. Sebagai sarana sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan RPD Kabupaten Kapuas tahun 2024-2026;
2. Sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan Bappelitbangda Kabupaten Kapuas;
3. Sebagai indikator pengukuran kinerja lima tahunan bagi Bappelitbangda Kabupaten Kapuas.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Strategis Bappelitbangda Kabupaten Kapuas tahun 2024 - 2026 adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penyusunan.

BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah Bappelitbangda Kabupaten Kapuas

Pada bab ini berisi mengenai peran (tugas dan fungsi) Bappeda Kabupaten Kapuas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas sumber daya yang dimiliki Bappelitbangda Kabupaten Kapuas dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Bappelitbangda Kabupaten Kapuas periode sebelumnya, mengemukakan



capaian prioritas Bappelitbangda Kabupaten Kapuas yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, serta mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi.

BAB III Permasalahan dan Isu – Isu Strategis Perangkat Daerah

Pada Bab ini berisi mengenai identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Kapuas, serta penentuan isu-isu strategis.

BAB IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi mengenai kebijakan Bappelitbangda Kabupaten Kapuas.

BAB V Startegi dan Arah Kebijakan

Pada bab ini berisi mengenai rencana program, kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif dari tiap program Bappelitbangda Kabupaten Kapuas.

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Pada bab ini berisi mengenai indikator kinerja Bappelitbangda Kabupaten Kapuas yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang kaidah pelaksanaan Renstra Bappeda Kabupaten Kapuas

BAB VIII Penutup



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BAPPELITBANGDA KABUPATEN KAPUAS

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Bappelitbangda

Sesuai Peraturan Bupati Kapuas Nomor 101 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, dan di bidang Penelitian dan Pengembangan yang menjadi kewenangan daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

1. Koordinasi dan fasilitasi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
2. Koordinasi dan fasilitasi penyusunan RKPD sebagai pelaksanaan dari RPJPD dan RPJMD;
3. Koordinasi dan fasilitasi perencanaan pembangunan daerah dengan K/L, Perangkat Daerah Provinsi dan Satuan Organisasi lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas
4. Penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
5. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan daerah;



6. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pengendalian, monitoring/evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kapuas mempunyai fungsi sebagai berikut :

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Bappelitbangda Kabupaten Kapuas dibagi dalam 1 (satu) sekretariat, 4 (empat) bidang dan 1 (satu) kelompok jabatan fungsional, yang mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1. Sekretariat

a. Tugas

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas mengkoordinasikan, membina, menyelenggarakan, mengendalikan dan mengevaluasi pelayanan administrasi umum, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian serta pelayanan publik pada Bappelitbangda.

b. Fungsi

- 1) koordinasi dan fasilitasi penyusunan kebijakan dan rencana teknis administrasi umum, administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan serta pelayanan publik dalam bentuk dokumen RENSTRA, RENJA, RKA dan DPA BAPPELITBANGDA;
- 2) koordinasi dan fasilitasi, pembinaan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan teknis administrasi



umum, administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan serta pelayanan publik;

- 3) koordinasi dan fasilitasi, pembinaan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan teknis tugas Subbagian dan Staf Fungsional;
- 4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan fungsi diatas, Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dibantu oleh 3 (tiga) Sub Bagian yaitu :

- 1) Sub Bagian Perencanaan
- 2) Sub Bagian Keuangan dan Aset
- 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

2. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

a. Tugas

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok menyiapkan dan menganalisis bahan penyusunan perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah, pengendalian, pemantauan, monitoring dan evaluasi serta pendataan dan pelaporan kegiatan pembangunan daerah.

b. Fungsi

- 1) mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah

- (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- 2) mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;
 - 3) melakukan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
 - 4) melakukan pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
 - 5) mengintegrasikan dan harmonisasi program program pembangunan di daerah
 - 6) merumuskan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
 - 7) mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
 - 8) melakukan evaluasi, analisis dan monitoring terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
 - 9) melakukan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
 - 10) mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
 - 11) mengolah dan menyajikan data informasi pembangunan daerah;
 - 12) melakukan pengamanan dan dokumentasi data;

- 13) menyusun nota pertimbangan, saran dan telaah terkait pelaksanaan kegiatan dan tugas Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Bappelitbangda berdasarkan peraturan dan pedoman yang berlaku sesuai dengan keadaan yang terjadi di lapangan untuk mendapatkan pertimbangan, saran dan petunjuk dari pimpinan;
- 14) memberikan pelayanan koordinasi dan konsultasi terkait pelaksanaan tugas Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Bappelitbangda kepada pihak yang membutuhkan sesuai dengan peraturan dan pedoman yang berlaku sehingga didapatkan informasi yang akurat dan tepat;
- 15) mengevaluasi pelaksanaan tugas berdasarkan laporan pelaksanaan tugas agar dapat dilakukan pemberian umpan balik/*feedback* dan pembenahan sehingga pelaksanaan tugas dapat berjalan lebih baik di waktu yang akan datang; dan
- 16) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan berdasarkan disposisi dan petunjuk dari pimpinan agar pelaksanaan tugas terlaksana dengan baik..

Dalam melaksanakan fungsi diatas, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dibantu oleh 3 (tiga) Sub Bidang, yaitu :

- 1) Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan



- 2) Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi
- 3) Sub Bidang Data dan Pelaporan

3. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

a. Tugas

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

b. Fungsi

- 1) mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan urusan pemerintahan, sosial dan kebudayaan;
- 2) mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah urusan Pemerintahan, Sosial dan Kebudayaan;
- 3) mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
- 4) mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi Sinergitas dan Harmonisasi kegiatan dengan K/L, Perangkat Daerah di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- 5) mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi Pelaksanaan Kesepakatan Bersama Kerjasama Antar Daerah;



- 6) mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi teknis perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah K/L, Perangkat Daerah di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- 7) menyusun nota pertimbangan, saran dan telaah terkait pelaksanaan kegiatan dan tugas Bidang Pemerintahan dan pembangunan Manusia pada Bappelitbangda berdasarkan peraturan dan pedoman yang berlaku sesuai dengan keadaan yang terjadi di lapangan untuk mendapatkan pertimbangan, saran dan petunjuk dari pimpinan;
- 8) memberikan pelayanan Koordinasi dan konsultasi terkait pelaksanaan tugas Bidang Pemerintahan dan pembangunan Manusia pada Bappelitbangda kepada pihak yang membutuhkan sesuai dengan peraturan dan pedoman yang berlaku sehingga didapatkan informasi yang akurat dan tepat;
- 9) mengevaluasi pelaksanaan tugas fungsional berdasarkan laporan pelaksanaan tugas agar dapat dilakukan pemberian umpan balik/*feedback* dan pembenahan sehingga pelaksanaan tugas dapat berjalan lebih baik di waktu yang akan datang; dan
- 10) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan berdasarkan disposisi dan petunjuk dari pimpinan agar pelaksanaan tugas terlaksana dengan baik.



Dalam melaksanakan fungsi diatas, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dibantu oleh 3 (tiga) Sub Bidang, yaitu :

- 1) Sub Bidang Pemerintahan
- 2) Sub Bidang Sosial
- 3) Sub Bidang Kebudayaan

4. Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan

a. Tugas

Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan.

b. Fungsi

- 1) Koordinasi dan fasilitasi penyusunan kebijakan urusan Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan dalam bentuk Dokumen RENSTRA, RENJA Perangkat Daerah.
- 2) Koordinasi dan fasilitasi, pembinaan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan teknis urusan Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur analisa dan pengkajian kewilayahan.
- 3) Koordinasi dan fasilitasi, pembinaan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan teknis tugas Kelompok Jabatan Fungsional.
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Dalam melaksanakan fungsi diatas, Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dibantu oleh 3 (tiga) Sub Bidang, yaitu :

- 1) Sub Bidang Perekonomian
- 2) Sub Bidang Sumber Daya Alam
- 3) Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

5. Bidang Penelitian dan Pengembangan

a. Tugas

Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, dan mengevaluasi penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan, ekonomi dan pembangunan, serta inovasi dan teknologi.

b. Fungsi

- 1) menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintahan Kabupaten Kapuas;
- 2) menyiapkan bahan penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan pemerintahan Kabupaten Kapuas;
- 3) menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di pemerintahan Kabupaten Kapuas;
- 4) menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan Kabupaten Kapuas;



- 5) menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di Kabupaten Kapuas;
- 6) menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup pemerintahan Kabupaten Kapuas;
- 7) menyiapkan bahan pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan daerah Kabupaten Kapuas ;
- 8) menyusun nota pertimbangan, saran dan telaah terkait pelaksanaan kegiatan dan tugas Bidang Pengendalian dan Pengembangan pada Bappelitbangda berdasarkan peraturan dan pedoman yang berlaku sesuai dengan keadaan yang terjadi di lapangan untuk mendapatkan pertimbangan, saran dan petunjuk dari pimpinan;
- 9) memberikan pelayanan Koordinasi dan konsultasi terkait pelaksanaan tugas Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Bappelitbangda pihak yang membutuhkan sesuai dengan peraturan dan pedoman yang berlaku sehingga didapatkan informasi yang akurat dan tepat;
- 10) mengevaluasi pelaksanaan tugas kepala Subbagian dan fungsional berdasarkan laporan pelaksanaan tugas agar dapat dilakukan pemberian umpan balik/*feedback* dan pembenahan sehingga pelaksanaan tugas dapat berjalan lebih baik di waktu yang akan datang; dan
- 11) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan berdasarkan disposisi dan



petunjuk dari pimpinan agar pelaksanaan tugas terlaksana dengan baik.

Dalam melaksanakan fungsi diatas, Bidang Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dibantu oleh 3 (tiga) Sub Bidang, yaitu :

- 1) Sub Bidang Litbang, Sosial dan Pemerintahan
- 2) Sub Bidang Litbang Ekonomi dan Pembangunan
- 3) Sub Bidang Litbang Inovasi dan Teknologi

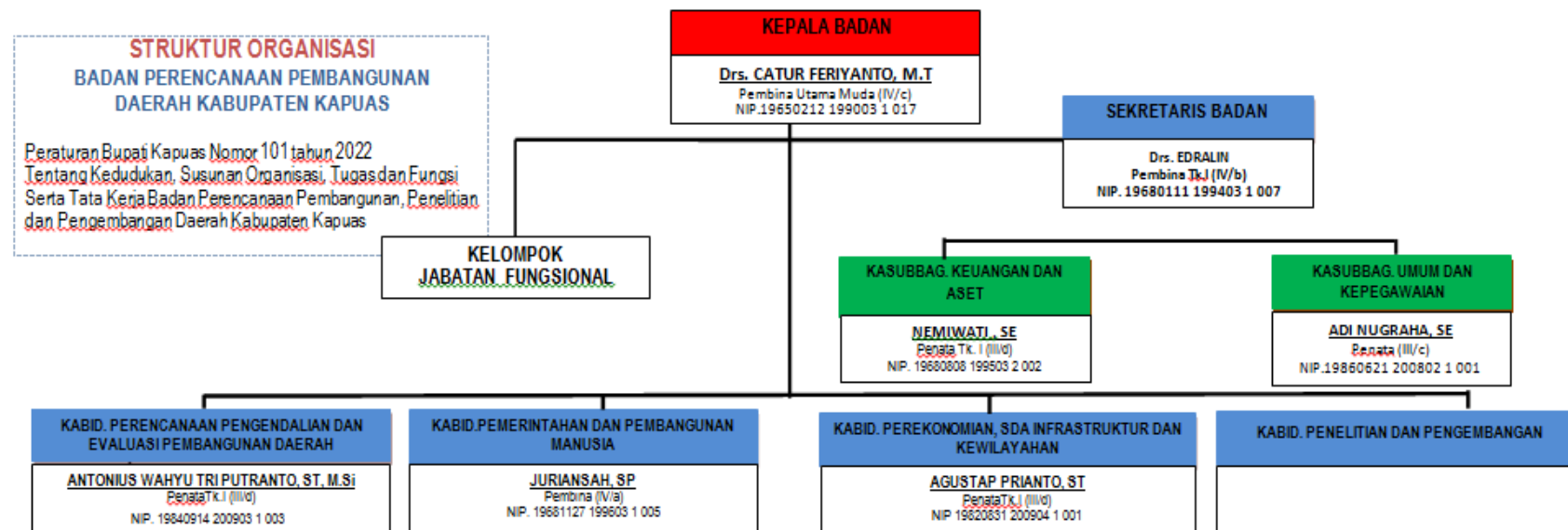
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dengan keahlian dan ketrampilan tertentu.



Gambar 2.1
Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Kapuas

Struktur organisasi secara rinci, sebagai berikut :



2.2 Sumber Daya Bappelitbangda Kabupaten Kapuas

1. Kondisi Kepegawaian

Jumlah pegawai Bappelitbangda Kabupaten Kapuas sampai dengan Januari 2023, tercatat sebanyak 48 (empat puluh delapan) orang, terdiri dari PNS sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang dan Tenaga Kontrak sebanyak 17 (tujuh belas) orang. Keadaan pegawai berdasarkan pendidikan, golongan, dan posisi jabatan adalah sebagai berikut :

a. Keadaan Pegawai Bappelitbangda Kabupaten Kapuas Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Gambaran mengenai pegawai Bappelitbangda Kabupaten Kapuas berdasarkan tingkat pendidikan sebagaimana tabel 2.1

Tabel 2.1
Pegawai Bappelitbangda Kabupaten Kapuas
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Bidang	SD	SLTP	SLTA	D.III	S-1	S-2	Jumlah (Orang)
1	Sekretariat	-	-	11	-	7	2	20
2	Bidan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	-	-	-	-	7	2	9
3	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-	-	1	-	4	2	7
4	Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	-	-	-	1	5	1	7
5	Bidang Penelitian dan Pengembangan	-	-	-	1	3	1	5
Total			-	12	2	26	8	48
Persentase			-	28,57	4,08	48,97	18,36	100

Berdasarkan tabel 2.1 diperoleh gambaran bahwa pegawai Bappelitbangda Kabupaten Kapuas berdasarkan tingkat pendidikan yang terendah adalah SLTA sebanyak 12 orang dan tingkat pendidikan yang tertinggi adalah Pasca Sarjana (S-2) sebanyak 8 orang

b. Keadaan Pegawai Bappelitbangda Kabupaten Kapuas Berdasarkan Jenis Kelamin

Komposisi pegawai di Bappelitbangda Kabupaten Kapuas berdasarkan jenis kelamin, dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2
Komposisi Pegawai Bappelitbangda Kabupaten Kapuas
Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Bidang	Jenis Kelamin		Jumlah (Orang)
		Laki-laki	Perempuan	
1	Sekretariat	13	7	20
2	Bidan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	6	3	9
3	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	4	3	7
4	Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	2	5	7
5	Bidang Penelitian dan Pengembangan	2	3	5
Total		27	21	48
Persentase		57,14	42,85	100

Berdasarkan tabel 2.2 diperoleh gambaran bahwa jumlah pegawai yang berjenis kelamin laki-laki lebih dominan dibanding jumlah pegawai yang berjenis kelamin perempuan, dilihat dari kondisinya hampir disemua bidang jumlah pegawai laki-laki lebih banyak dibanding pegawai perempuan.

c. Keadaan Pegawai Bappelitbangda Kabupaten Kapuas Berdasarkan Golongan

Berdasarkan Golongan, komposisi pegawai Bappelitbangda Kabupaten Kapuas terbanyak adalah golongan III. Secara lengkap komposisi pegawai Bappelitbangda Kabupaten Kapuas berdasarkan golongan dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut :

Tabel 2.3
Komposisi Pegawai Bappelitbangda Kabupaten Kapuas
Berdasarkan Golongan

No	Bidang	Golongan					Jumlah (Orang)
		Tenaga Kontrak	I	II	III	IV	
1	Sekretariat	11	-	2	7	2	20
2	Bidan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	2	-	-	6	1	9
3	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1	-	-	4	2	7
4	Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	2	-	-	5	-	7
5	Bidang Penelitian dan Pengembangan	1	-	-	3	1	5
Total		17	-	-	25	6	48
Persentase		32,65	-	4,08	51,02	12,24	100

d. Keadaan Pegawai Bappelitbangda Kabupaten Kapuas Berdasarkan Eselonering

Berdasarkan Eselonering, secara lengkap komposisi pegawai Bappelitbangda Kabupaten Kapuas dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut :

Tabel 2.4
Komposisi Pegawai Bappelitbangda Kabupaten Kapuas
Berdasarkan Eselonering

No	Bidang	Eselonering			Jumlah (Orang)
		II	III	IV	
1	Sekretariat	1	1	2	4
2	Bidan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	-	1	-	1
3	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-	1	-	1
4	Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	-	1	-	1
5	Bidang Penelitian dan Pengembangan	-	1	-	1
Total		1	5	2	6
Persentase		4,76	23,81	71,43	100

2. Sarana dan Prasarana

Jenis sarana dan prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, peralatan komputer, telekomunikasi dan transportasi. Kondisi sarana dan prasarana di Bappelitbangda Kabupaten Kapuas sejauh ini dirasa telah cukup memadai untuk menunjang kinerja.

Saat ini Bappelitbangda Kabupaten Kapuas telah memiliki 1 (satu) unit server lokal berupa E-Planning sebagai upaya yang dilakukan Bappelitbangda Kabupaten Kapuas untuk meningkatkan kualitas layanan sesuai tugas pokok dan fungsi (tufoksi) yang diamanatkan dan langkah yang dilakukan adalah pembangunan dan perbaikan sistem informasi yang menunjang tufoksi.

Sarana transportasi berupa kendaraan dinas baik roda 2 (dua) maupun roda 4 (empat) untuk operasional organisasi cukup

memadai dari segi kuantitas dan kualitas, yang didukung penambahan dan/atau peremajaan kendaraan untuk menggantikan kendaraan dinas yang sudah tua umur ekonomisnya.

Prasarana penunjang seperti ruang kerja, gedung atau ruang rapat cukup memadai. Pada tahun 2021 dilakukan rehabilitasi gedung kerja untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan dalam rangka peningkatan produktivitas kerja.

Tabel 2.5
Jumlah Aset Berdasarkan Jenis Pada Bappelitbangda
Kabupaten Kapuas Tahun 2023

No.	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
1	2	3	4
Alat Angkutan Darat Bermotor			
1	Mini Bus (Penumpang 14 org kebawah)	4	Baik
2	Sepeda Motor	25	Baik
Alat Ukur Universal			
3	Global Positioning System	1	Baik
4	Scanner	5	Baik
5	Air Conditioning Unit	15	Baik
Alat Kantor dan Rumah Tangga			
Alat Kantor			
6	Mesin Ketik	3	Rusak
7	Mesin Fotocopy	1	Baik
8	Rak Besi/Metal	1	Baik
9	Rak Kayu	1	Baik
10	Mesin Absensi	1	Baik
11	Display	1	Baik
12	Layar Film	4	Baik
Alat Rumah Tangga			
Meubilair			
13	Meja Rapat	2	Baik
14	Kursi Rapat	2	Baik
15	Kursi Tamu	2	Baik
16	Kursi Putar	5	Baik
17	Kursi Lipat	1	Baik
18	Sofa	2	Baik

19	Meja Kerja	54	Baik
20	Meubeleur lainnya	7	Baik
Alat Pendingin			
21	Lemari Es	3	Baik
22	Kipas Angin	1	Baik
Alat Rumah Tangga Lainnya			
23	Televisi	7	Baik
24	Equalizer	1	Baik
25	Sound System	1	Baik
26	Wireless	3	Baik
27	Microphone	3	Baik
28	Microphone Table Stand	4	Baik
29	Power Supply Microphone	1	Baik
30	Camera Video	1	Baik
31	Tangga Almunium	1	Baik
32	LCD Projector/Infocus	5	Baik
33	Chairman/Audio Conference	1	Baik
34	Speaker aktif	2	Baik
35	Mesin Pompa Air	2	Baik
Peralatan Komputer			
36	Personal Komputer Lain-Lain	4	Baik
37	PC Unit	21	Baik
38	Laptop	23	Baik
39	Note Book	9	Baik
Peralatan Komputer Mainframe			
40	Plotter	1	Baik
41	Hard Disk	14	Baik
42	Printer	16	Baik
Peralatan Personal Komputer			
43	Printer	16	Baik
44	Peralatan Personal Komputer Lain-lain	1	Baik
Peralatan Jaringan			
45	Server	1	Baik
46	Router	1	Baik
Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat			
47	Meja Tamu Ruangn Biasa	1	Baik
Kursi Kerja Pejabat			
48	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	2	Baik
Lemari dan Arsip Pejabat			
49	Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis	7	Baik
Peralatan Studio Visual			

50	Proyektor+Attachment	8	Baik
51	Microphone/Wireless Mic	1	Baik
52	Unintemuptible Power Suplly (UPS)	10	Baik
53	Power Amplifier	1	Baik
54	Microphone Table Stand	4	Baik
55	Peralatan Studio Visual Lain-lain	3	Baik
56	Kable Sound System	1	Baik
57	Peralatan Studio Lain-lain	4	Baik
Alat Komunikasi Telephone			
58	Facsimile	2	Baik
59	Alat Komunikasi Radio SSB Lain-lain	1	Baik
60	Alat Komunikasi Radio HF/FM Lain-lain	1	Baik
Alat Laboratorium Microbiologi			
61	Stabilizer	1	Baik
Alat Laboratorium Pertanian			
62	Generator	1	Baik
Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran			
63	Tripod	1	Baik
Bangunan Gedung Kantor			
64	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	Baik
65	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	2	Baik
66	Bangunan Tertutup Permanen	1	Baik
67	Bangunan Tertutup Tempat Pertemuan Permanen	1	Baik
Gedung Garasi/Pool			
68	Gedung Garasi/Pool Permanen	1	Baik
69	Gedung Garasi/Pool Semi Permanen	1	Baik
Bangunan Air Irigasi			
70	Bangunan Pengemilan Irigasi	1	Baik
71	Sumur dengan Pompa	1	Baik
Instalasi Air Bersih/Air Baku lainnya			
72	Instalasi Air Bersih Lain-lainnya	1	Baik
Instalasi Pusat Pengatur Listrik			
73	Instalasi Pusat Pengatur Listrik Lain-lain	1	Baik
Jaringan Tranmisi			
74	Jaringan Tranmisi Lain-lain	1	Baik
Jaringan Distribusi			
75	Jaringan Distribusi Tegangan dibawah 1 KVA	1	Baik
Jaringan Telepon diatas Tanah			
76	Jaringan Telepon diatas Tanah Kapasitas Kecil	1	Baik

2.3 Kinerja Pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Kapuas

Sebagaimna diamanatkan dalam Undang-undang No.25 tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan bagian tahapan pencapaian visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025. RPJMD merumuskan tantangan serta strategi kebijakan dan target yang akan diambil untuk menjawab segala permasalahan dalam 5 tahun, dengan demikian, RPJMD merupakan acuan untuk seluruh komponen baik untuk pemerintah, masyarakat dan juga dunia usaha dalam mewujudkan cita-cita maupun tujuan secara sinergis, koordinatif dan saling melengkapi.

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kapuas merupakan unit kerja dari Pemerintah Kabupaten Kapuas Perda Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 33). Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kapuas adalah unsur pelaksana teknis perencanaan pembangunan daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Kapuas. Gambaran kinerja Bappelitbangda Kabupaten Kapuas selama 5 (lima) tahun sebelumnya 2018 - 2022 dapat dilihat pada Tabel 2.6 Tabel 2.7 berikut :

**ANGGARAN DAN ANGGARAN REALISASI BAPPELITBANGDA
KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2018 - 2022**

Uraian	Anggaran Tahun					Realisasi Anggaran Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Belanja Tidak Langsung (BTL)	2.794.744.000	2.805.360.000	2.903.734.000	3.218.930.000		2577707416	2.653.499.053	2.654.523.603	2.936.160.243	
Belanja Langsung (BL)	5.550.000.000	4.500.000.000	4.275.220.000	3.601.097.089		3.857.697.279	3.971.177.371	4.131.553.377	3.362.347.909	
Belanja Operasional					9.885.014.615					8975870296
Belanja Modal					788.456.850					765224675

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Kapuas

Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Kapuas dalam kurun waktu lima tahun kedepan, perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang ada, guna meningkatkan kebijakan pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Kapuas untuk mendukung pencapaian target dan sasaran RPJMD.

1. Tantangan

Dalam melaksanakan pelayanan, Bappelitbangda harus dapat menjawab tantangan yang muncul, yaitu :

- Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perencanaan, pengendalian, dan evaluasi;
- Kebutuhan data dan informasi yang akurat dan tersedia tepat waktu;
- Tuntutan masyarakat terhadap layanan informasi yang cepat dan tepat;
- Kebutuhan informasi referensi hasil-hasil penelitian.

2. Peluang

Peluang bagi Bappelitbangda Kabupaten dalam melaksanakan pelayanan adalah sebagai berikut :

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai pedoman untuk meningkatkan konsistensi dan sinkronisasi perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan daerah;
- b. Pemanfaatan teknologi informasi untuk perbaikan sistem layanan dan peningkatan efektivitas dan efesiensi pelaksanaan tugas dan fungsi;
- c. Memperluas jejaring dalam rangka penyediaan data dan informasi yang handal;
- d. Menetapkan hasil-hasil kajian menjadi produk hukum daerah.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BAPPELITBANGDA KABUPATEN KAPUAS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Kapuas

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Bappelitbangda Kabupaten Kapuas masih menghadapi beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

Tabel 3.1
Analisis Permasalahan

No.	Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar Permasalahan
1.	Belum optimalnya hasil pembangunan	Belum optimalnya kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah	- Belum optimalnya capaian sasaran RKPD yang sesuai dengan RPJMD - Belum optimalnya capaian program RKPD yang sesuai dengan RPJMD - Belum optimalnya keselarasan sasaran Renja perangkat daerah yang selaras dengan sasaran RPJMD
2.	Rendahnya kualitas kajian pembangunan daerah	Masih rendahnya implementasi hasil kajian pembangunan daerah	Masih rendahnya rekomendasi hasil kajian
3.	Rendahnya kualitas pelayanan publik	Rendahnya kompetensi SDM di bidang Perencanaan dan Litbang	Belum optimalnya diklat/bimtek untuk aparatur

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahunan. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program PD

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah Bappelitbangda Kabupaten Kapuas beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel 4.1 berikut ini :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kapuas

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET AWAL	TARGET 2024	TARGET 2025	TARGET 2026
1.	Mengoptimalkan hasil pembangunan		Persentase sasaran pembangunan daerah yang tercapai sesuai target	75%	81%	83%	85%
		Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah	Persentase capaian sasaran RKPD yang sesuai dengan RPD	75%	81%	83%	85%
			Persentase capaian program RKPD yang sesuai dengan RPD	75%	81%	83%	85%
			Persentase keselarasan sasaran Renja perangkat daerah yang selaras dengan sasaran RPD	75%	81%	83%	85%
2.	Meningkatkan Kualitas Kajian Pembangunan Daerah		Persentase Hasil Kajian yang ditindaklanjuti dan diterapkan oleh stakeholder	97.70%	98%	98,50%	99%
		Meningkatnya Implementasi Hasil Kajian Pembangunan Daerah	Persentase Hasil Kajian yang diterapkan	97.70%	98%	98,50%	99%
			Persentase Hasil Inovasi yang diterapkan	97%	97,50%	98%	98,50%
3.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik		indeks pelayanan publik	86%	87%	88%	89%
		Meningkatnya kepuasan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86%	87%	88%	89%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan upaya-upaya yang diarahkan untuk mewujudkan sasaran dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Arah kebijakan memberikan pedoman bagaimana strategi terhubung ke sasaran dan kapan sasaran tersebut harus tercapai. Rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang, disajikan dalam tabel 5.1

Tabel 5.1

**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAEAHKABUPATEN KAPUAS
TAHUN 2024 – 2026**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5	6
1	Mengoptimalkan hasil pembangunan Indikator : Persentase sasaran pembangunan daerah yang tercapai sesuai target	Meningkatnya kualitas perencanaaan dan pengendalian pembangunan daerah	Persentase capaian sasaran RKPD yang sesuai dengan RPD	Meningkatkan capaian sasaran RKPD yang sesuai dengan RPJMD	Mengoptimalkan capaian sasaran RKPD yang sesuai dengan RPJMD
			Persentase capaian program RKPD yang sesuai dengan RPD	Meningkatkan capaian program RKPD yang sesuai dengan RPJMD	Mengoptimalkan capaian program RKPD yang sesuai dengan RPJMD
			Persentase keselarasan sasaran Renja perangkat daerah yang selaras dengan sasaran RPD	Meningkatkan sasaran Renja perangkat daerah yang selaras dengan sasaran RPJMD	Mengoptimalkan sasaran Renja perangkat daerah yang selaras dengan sasaran RPJMD

2	Meningkatkan kualitas kajian pembangunan daerah Indikator : Peresentase hasil kajian yang ditindaklanjuti dan diterapkan oleh stakeholder	2. Meningkatnya Implementasi hasil kajian pembangunan daerah	1. Persentase hasil kajian yang ditindaklanjuti dan diterapkan oleh stakeholder 2. Persentase hasil inovasi yang ditindaklanjuti dan diterapkan oleh stakeholder	Meningkatkan pelaksanaan kajian, hasil inovasi dan penerapan teknologi dalam perencanaan pembangunan	1. Meningkatkan kajian bidang Sosial dan Pemerintahan 2. Meningkatkan kajian bidang Ekonomi dan Pembangunan 3. Mengoptimalkan penerapan hasil inovasi dan teknologi
3	Meningkatkan kualitas pelayanan publik Indikator : Indeks pelayanan publik	3. Meningkatnya kepuasan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatkan Kepuasan Perangkat Daerah terhadap Pelayanan yang diberikan Oleh Bappelitbangda	1. Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Meningkatkan Kualitas Sarana, Prasarana dan SDM Bappelitbangda 3. Meningkatkan Kualitas Pertanggungjawaban dan Realisasi Keuangan Bappelitbangda

BAB VI

RENCANA PROGRAM , KEGIATAN, DAN PENDANAAN

Rencana program/kegiatan, serta indikator kinerja dan pendanaan yang disusun di dalam Renstra Bappelitbangda Kabupaten Kapuas bersifat indikatif. Dengan disusunnya sedemikian mengingat paradigma pembangunan di masa transisi 3 (tiga) tahunan tentunya tidak akan berjalan secara statis, namun akan mengalami dinamisasi seiring dengan semakin berkembangnya permasalahan pembangunan. Kondisi demikian membutuhkan penyesuaian di dalam penetapan rencana program, kegiatan, indikator kinerja maupun pendanaan khususnya di dalam proses perencanaan pembangunan, Penelitian dan Pengembangan di Kabupaten Kapuas yang dalam hal ini Bappelitbangda Kabupaten Kapuas.

A. RENCANA PROGRAM/KEGIATAN

Rencana program/kegiatan disusun berdasarkan kewenangan, serta tugas pokok dan fungsi Bappelitbangda Kabupaten Kapuas yang menengani urusan perencanaan dan kelitbangan.

Rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnya, serta pendanaan indikatif untuk membiayai program dan kegiatan selama lima tahun yang akan datang. Penjabaran rencana dan program, kegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan indikatif untuk Bappelitbangda Kabupaten Kapuas selama tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel 6.1 berikut :



Tabel 6.1

**RENCANA DAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA SERTA PENDANAAN INDIKATIF
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAEAHKABUPATEN KAPUAS
TAHUN 2024 – 2026**

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET AWAL (Realisasi Tahun 2022)	TARGET & PENDANAAN						TARGET AKHIR	
							2024		2025		2026			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Mengoptimalkan hasil pembangunan					Persentase sasaran pembangunan daerah yang tercapai sesuai target	75%	81%	1.626.710.209,00	83%	1.783.841.900,00	85%	1.970.091.107,00	85%	
	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah				Persentase capaian sasaran RKPD yang sesuai dengan RPD	n/a	81%	1.626.710.209,00	83%	1.783.841.900,00	85%	1.970.091.107,00	85%	
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			Persentase terpenuhinya dokumen hasil Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	100%	495.841.492,00	100%	500.000.000,00	100%	584.943.923,00	100%	
					Persentase terpenuhinya dokumen hasil Pengendalian dan Evalusi Pembangunan Daerah	100%	100%	400.000.000,00	100%	482.375.090,00	100%	500.000.000,00	100%	
			Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	3 dokumen	3 dokumen	695.841.492,00	3 dokumen	782.375.090,00	2 dokumen	884.943.923,00	6 dokumen	



				Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	n/a	500	150.841.492,00	500	182.375.090	500	384.943.923	1500
				Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1	1	35.000.000,00	1	50.000.000	1	100.000.000	3
				Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3	3	475.000.000,00	3	500.000.000	2	300.000.000	8
				Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1	1	35.000.000,00	1	50.000.000	1	100.000.000	3
			Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	1 Dokumen	100.000.000,00	1 Dokumen	100.000.000,00	3 Dokumen	

				Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1	1	40.000.000,00	1	40.000.000	1	40.000.000	3
				Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	48	46	30.000.000,00	46	30.000.000	46	30.000.000	46
				Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1	1	30.000.000,00	1	30.000.000	1	30.000.000	3
			Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	3	

				Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	1	1	40.000.000,00	1	40.000.000	1	40.000.000	3
				Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	1	1	60.000.000,00	1	60.000.000	1	60.000.000	3
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			Persentase Capaian Program RKPD yang sesuai dengan RPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	n/a	81%	350.000.000,00	83%	400.000.000,00	85%	430.000.000,00	85%

				Persentase Capaian Program RKPD yang sesuai dengan RPD Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	n/a	81%	380.868.717,00	83%	401.466.810,00	85%	455.147.184,00	85%
			Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Capaian Program Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang sesuai dengan RKPD	n/a	82%	250.000.000,00	84%	300.000.000,00	86%	330.000.000,00	86%
				Persentase Capaian Program Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan yang sesuai dengan RKPD	n/a	82%	100.000.000,00	84%	100.000.000,00	86%	100.000.000,00	86%



				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	n/a	1	62.500.000,00	1	75.000.000	1	82.500.000	3
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	n/a	1	62.500.000,00	1	75.000.000	1	82.500.000	3



				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	n/a	1	62.500.000,00	1	75.000.000	1	82.500.000	3
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	n/a	1	62.500.000,00	1	75.000.000	1	82.500.000	3
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Pemerintahan	n/a	1	25.000.000,00	1	25.000.000	1	25.000.000	3

				Bidang Pemerintah an									
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	n/a	1	25.000.000,00	1	25.000.000	1	25.000.000	3
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan an	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	n/a	1	25.000.000,00	1	25.000.000	1	25.000.000	3

				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	n/a	1	25.000.000,00	1	25.000.000	1	25.000.000	3
			Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		Persentase Capaian Program Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) yang sesuai dengan RKPD	n/a	82%	200.000.000,00	84%	200.000.000,00	86%	200.000.000,00	86%
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	n/a	1	25.000.000,00	1	25.000.000	1	25.000.000	3

				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	n/a	1	25.000.000,00	1	25.000.000	1	25.000.000	3
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4	4	25.000.000,00	4	25.000.000	4	25.000.000	12
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4	4	25.000.000,00	4	25.000.000	4	25.000.000	12



				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	n/a	1	25.000.000,00	1	25.000.000	1	25.000.000	3
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	n/a	1	25.000.000,00	1	25.000.000	1	25.000.000	3
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	n/a	1	25.000.000,00	1	25.000.000	1	25.000.000	3



				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	n/a	1	25.000.000,00	1	25.000.000	1	25.000.000	3
			Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		Persentase Capaian Program Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang sesuai dengan RKPD	n/a	82%	180.868.717,00	84%	201.466.810,00	86%	255.147.184,00	86%
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2	2	22.608.589,00	2	25.183.351	2	31.893.398	6

				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	n/a	1	22.608.589,00	1	25.183.351	1	31.893.398	3
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	n/a	1	22.608.589,00	1	25.183.351	1	31.893.398	3

				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2	2	22.608.589,00	2	25.183.351	2	31.893.398	6
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	n/a	1	22.608.589,00	1	25.183.351	1	31.893.398	3
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	n/a	1	22.608.589,00	1	25.183.351	1	31.893.398	3

				r									
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	n/a	1	22.608.589,00	1	25.183.351	1	31.893.398	3
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	n/a	1	22.608.589,00	1	25.183.351	1	31.893.398	3



Meningkatkan Kualitas Kajian Pembangunan Daerah					Persentase Hasil Kajian yang ditindaklanjuti dan diterapkan oleh stakeholder	97.70%	98%	721.725.270,00	98,50%	791.440.153,00	99%	874.073.654,00	99%
	Meningkatnya Implementasi Hasil Kajian Pembangunan Daerah				Persentase Hasil Kajian yang diterapkan	97.70%	98%	621.725.270,00	98,50%	691.440.153,00	99%	774.073.654,00	99%
					Persentase Hasil Inovasi yang diterapkan	97%	97,50%	100.000.000,00	98%	100.000.000,00	98,50%	100.000.000,00	98,50%
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			Jumlah Rekomendasi Hasil Kajian	4 rekomendasi	4 rekomendasi	721.725.270,00	5 rekomendasi	791.440.153,00	6 rekomendasi	874.073.654,00	6 rekomendasi
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		Jumlah Dokumen Kajian Bidang Sosial dan Kependudukan	1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	1 Dokumen	300.000.000,00	1 Dokumen	300.000.000,00	3 Dokumen
				Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	n/a	1	300.000.000,00	0	0	0	0	1
				Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	n/a	0	0,00	1	0	1	300.000.000	1
				Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	1	0	0,00	1	300.000.000	0	0	1



				Sosial									
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan		Jumlah Dokumen Kajian Bidang Ekonomi dan Pembangunan	1 Dokumen	1 Dokumen	321.725.270,00	1 Dokumen	391.440.153,00	1 Dokumen	474.073.654,00	3 Dokumen
				Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	n/a	0	0,00	0	0	1	474.073.654	1
				Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	n/a	0	0,00	1	391.440.153	0	0	1
				Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	n/a	1	321.725.270,00	0	0	0	0	1
			Pengembangan Inovasi dan Teknologi		Jumlah Dokumen Pengembangan Inovasi dan Teknologi	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	1 Dokumen	100.000.000,00	1 Dokumen	100.000.000,00	3 Dokumen



				Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1	1	100.000.000,00	1	100.000.000	1	100.000.000	3
Meningkatkan kualitas pelayanan publik					indeks pelayanan publik	86%	87%	5.478.742.308,00	88%	6.007.960.136,00	89%	6.635.245.438,00	89%
	Meningkatnya kepuasan masyarakat				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86%	87%	5.478.742.308,00	88%	6.007.960.136,00	89%	6.635.245.438,00	89%
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	n/a	70%	5.478.742.308,00	70,50%	6.007.960.136,00	71%	6.635.245.438,00	71%
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	100.000.000,00	8 Dokumen	100.000.000,00	8 Dokumen	100.000.000,00	8 Dokumen
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	2	50.000.000,00	2	50.000.000	2	50.000.000	6

				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	5.000.000,00	1	5.000.000	1	5.000.000	3
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	5.000.000,00	1	5.000.000	1	5.000.000	3
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1	5.000.000,00	1	5.000.000	1	5.000.000	3
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1	5.000.000,00	1	5.000.000	1	5.000.000	3



				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	30.000.000,00	2	30.000.000	2	30.000.000	6
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Keuangan Berbasis Akrua	1 Laporan	1 Laporan	3.876.075.000,00	1 Laporan	3.970.726.875,00	1 Laporan	4.067.745.046,00	3 Laporan
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	14	14	100.000.000,00	14	100.000.000	14	100.000.000	42
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35	35	3.776.075.000,00	35	3.870.726.875	35	3.967.745.046	35
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Aset Milik Daerah di Bappelitbangda	12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	12 Laporan	10.000.000	12 Laporan	10.000.000	36 Laporan
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	n/a	2	10.000.000,00	2	10.000.000	2	10.000.000	6



			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Terpenuhinya Jumlah Kebutuhan ASN di Bappelitbangda sesuai ANJAB	n/a	85%	100.000.000,00	90%	100.000.000,00	95%	100.000.000,00	95%
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	n/a	10	20.000.000,00	10	20.000.000	10	20.000.000	30
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	n/a	12	20.000.000,00	6	20.000.000	6	20.000.000	24
				Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	n/a	1	20.000.000,00	1	20.000.000	1	20.000.000	3
				Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	n/a	1	20.000.000,00	1	20.000.000	1	20.000.000	3

				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	n/a	2	20.000.000,00	2	20.000.000	2	20.000.000	6
			Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Unit Kerja Internal Bappelitbangda yang terlayani	100%	100%	650.000.000,00	100%	650.000.000,00	100%	1.037.500.392,00	100%
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	n/a	1	81.250.000,00	1	81.250.000	1	129.687.549	3
				Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	n/a	1	81.250.000,00	1	81.250.000	1	129.687.549	3
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	n/a	1	81.250.000,00	1	81.250.000	1	129.687.549	3
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	n/a	1	81.250.000,00	1	81.250.000	1	129.687.549	3



				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	n/a	12	81.250.000,00	12	81.250.000	12	129.687.549	36
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	n/a	1	81.250.000,00	1	81.250.000	1	129.687.549	3
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	n/a	1	81.250.000,00	1	81.250.000	1	129.687.549	3
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	n/a	1	81.250.000,00	1	81.250.000	1	129.687.549	3
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	1 Paket	1 Paket	322.667.308,00	1 Paket	757.233.261,00	1 Paket	900.000.000,00	3 Paket
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	n/a	1	105.666.827,00	1	428.616.631	1	500.000.000	3
				Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	n/a	1	105.666.827,00	1	214.308.315	1	250.000.000	3



				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	n/a	3	111.333.654,00	3	114.308.315	3	150.000.000	9
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Jasa Penunjang Perangkat Daerah yang disediakan	100%	100%	300.000.000,00	100%	300.000.000,00	100%	300.000.000,00	100%
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	n/a	1	75.000.000,00	1	75.000.000	1	75.000.000	3
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	n/a	1	75.000.000,00	1	75.000.000	1	75.000.000	3
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	n/a	1	145.000.000,00	1	145.000.000	1	145.000.000	3
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	n/a	1	5.000.000,00	1	5.000.000	1	5.000.000	3



			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang dilakukan pemeliharaan	100%	100%	120.000.000,00	100%	120.000.000,00	100%	120.000.000,00	100%
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	n/a	15	60.000.000,00	15	60.000.000	15	60.000.000	15
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	n/a	1	60.000.000,00	1	60.000.000	1	60.000.000	1
TOTAL								7.827.177.787,00		8.583.242.189,00		9.479.410.199,00	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja pada Bappelitbangda Kabupaten Kapuas secara prinsip harus sinergis dengan indikator di dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kapuas Tahun 2024-2026. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan di Kabupaten Kapuas saling bersinergi. Lebih lanjut indikator kinerja Bappelitbangda Kabupaten Kapuas harus dapat merepresentasikan upaya di dalam peningkatan kinerja perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah khususnya di Kabupaten Kapuas.

Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Pada bagian ini akan ditampilkan Indikator Kinerja Bappelitbangda Kabupaten Kapuas yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD. Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam tiga tahunan mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD. Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Bappelitbangda yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPD, disajikan dalam Tabel 7.1 berikut ini :

Tabel 7.1
 Indikator Kinerja Perangkat Daerah Bappelitbangda Kabupaten Kapuas
 yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

NO	INDIKATOR	TARGET AWAL	TARGET 2024	TARGET 2025	TARGET 2026
1.	Persentase capaian sasaran RKPD yang sesuai dengan RPD	75%	81%	83%	85%
2.	Persentase capaian program RKPD yang sesuai dengan RPD	75%	81%	83%	85%
3.	Persentase keselarasan sasaran Renja perangkat daerah yang selaras dengan sasaran RPD	75%	81%	83%	85%
4.	Persentase Hasil Kajian yang diterapkan	97.70%	98%	98,50%	99%
5.	Persentase Hasil Inovasi yang diterapkan	97%	97,50%	98%	98,50%
6.	indeks kepuasan masyarakat (IKM)	86%	87%	88%	89%

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Kapuas disusun berdasarkan tahapan dan tata cara penyusunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.

Penyusunan Rencana Strategis telah dilaksanakan sesuai tahapan penyusunan serta verifikasi untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan Perangkat Daerah dalam Renstra telah selaras dengan Peraturan Bupati Kapuas Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2024-2026.

Dengan selesainya penyusunan Rencana Strategis ini, diharapkan dapat berguna sebagai :

1. Pedoman bagi seluruh unit kerja Bappelitbangda Kabupaten Kapuas dalam melaksanakan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis;
2. Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perangkat daerah tahunan;
3. Pedoman dan tolak ukur kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan serta sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja.

Apabila dikemudian hari Rencana Strategis ini terdapat ketidaksesuaian akibat perkembangan baik dari internal maupun eksternal, maka akan dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kuala Kapuas,

**Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Kapuas,**



Drs. CATUR FERIVANTO, MT
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19650212 199003 1 017

LAMPIRAN

PEMETAAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGANDAERAH

KEPMEN 050-3708/2020										KEPMEN 050-5889/2021									
Kode				Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Satuan		Kode				Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Satuan	
1				2		3		4		1				2		3		4	
5	1	2			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1. Persentase capaian program prioritas pembangunan daerah		Persen		5	1	2		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		1. Persentase capaian program prioritas pembangunan daerah		Persen	
						2. Persentase capaian program pembangunan daerah		Persen								2. Persentase capaian program pembangunan daerah		Persen	
						3. Persentase capaian sasaran pembangunan daerah		Persen								3. Persentase capaian sasaran pembangunan daerah		Persen	
5	1	2	2:01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pendanaan		Dokumen		5	1	2	2:01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pendanaan		Dokumen	
5	1	2	2:01	4	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Forum Lintas SKPD		Dokumen		5	1	2	2:01	4	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah		Berita Acara	
5	1	2	2:01	5	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Musrenbang Kabupaten		Dokumen		5	1	2	2:01	5	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota		Berita Acara	
5	1	2	2:01	6	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Bahan dan Hasil Musrenbang Kecamatan		Dokumen		5	1	2	2:01	6	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan		Usulan	
5	1	2	2:01	7	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan		Dokumen		5	1	2	2:01	7	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)		Dokumen	
5	1	2	2:02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Dokumen		5	1	2	2:02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Dokumen	
5	1	2	2:02	1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah		Laporan		5	1	2	2:02	1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)		Masukan	
5	1	2	2:02	2	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Persentase pembinaan dan pemanfaatan data pelaksanaan pembangunan daerah		Persen		5	1	2	2:02	2	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi		Org	
5	1	2	2:02	3	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen profil pembangunan daerah		Dokumen		5	1	2	2:02	3	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan		Buku	
5	1	2	2:03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah		Dokumen		5	1	2	2:03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah		Dokumen	
5	1	2	2:03	1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah		Kegiatan		5	1	2	2:03	1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan		Laporan	
5	1	2	2:03	3	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Daerah		Laporan		5	1	2	2:03	3	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah		Laporan	
										5	1	2	2:04		Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah		Dokumen	
										5	1	2	2:04	3	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota		Dokumen	

5	1	3				PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1. Persentase capaian program pembangunan daerah bidang perekonomian SDA Infrastruktur dan Kewilayahan	Persen	5	1	3				PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1. Persentase capaian program pembangunan daerah bidang perekonomian SDA Infrastruktur dan Kewilayahan	Persen
							2. Persentase capaian sasaran pembangunan daerah dalam RPJMD bidang perekonomian SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	Persen								2. Persentase capaian sasaran pembangunan daerah dalam RPJMD bidang perekonomian SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	Persen
							3. Persentase capaian program pembangunan daerah bidang PPM	Persen								3. Persentase capaian program pembangunan daerah bidang PPM	Persen
							4. Persentase capaian sasaran pembangunan daerah dalam RPJMD bidang PPM	Persen								4. Persentase capaian sasaran pembangunan daerah dalam RPJMD bidang PPM	Persen
5	1	3	2:02			Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	1. Persentase capaian program pembangunan daerah sub bidang Perekonomian	Persen	5	1	3	2:02			Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	1. Persentase capaian program pembangunan daerah sub bidang Perekonomian	Persen
							2. Persentase capaian program pembangunan daerah sub bidang SDA	Persen								2. Persentase capaian program pembangunan daerah sub bidang SDA	Persen
5	1	3	2:02	1		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah program yang mendukung prioritas pembangunan daerah bidang Perekonomian	Program	5	1	3	2:02	1		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen
5	1	3	2:02	2		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Program pembangunan daerah pada bidang Perekonomian	Program	5	1	3	2:02	2		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	Perangkat Daerah
5	1	3	2:02	3		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1. Jumlah Laporan monitoring pelaksanaan pembangunan sub bidang Perekonomian	Laporan	5	1	3	2:02	3		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	Perangkat Daerah
							2. Jumlah Dokumen Evaluasi pelaksanaan Pembangunan sub bidang Perekonomian	Dokumen									
5	1	3	2:02	4		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Kegiatan	5	1	3	2:02	4		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Laporan
5	1	3	2:02	5		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Program yang mendukung prioritas pembangunan daerah Sumber Daya Alam	Program	5	1	3	2:02	5		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen
5	1	3	2:02	6		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Program pembangunan daerah pada Sumber Daya Alam	Program	5	1	3	2:02	6		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Perangkat Daerah
5	1	3	2:02	7		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1. Jumlah Laporan monitoring pelaksanaan pembangunan sub bidang SDA	Laporan	5	1	3	2:02	7		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Perangkat Daerah
							2. Jumlah Dokumen Evaluasi pelaksanaan Pembangunan sub bidang SDA	Dokumen									
5	1	3	2:02	8		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Kegiatan	5	1	3	2:02	8		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Laporan
5	1	3	2:03			Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Capaian program pembangunan daerah sub bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persen	5	1	3	2:03			Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Capaian program pembangunan daerah sub bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persen
5	1	3	2:03	1		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Program yang mendukung prioritas pembangunan daerah Bidang Infrastruktur	Program	5	1	3	2:03	1		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen
5	1	3	2:03	2		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Program pembangunan daerah pada Bidang Infrastruktur	Program	5	1	3	2:03	2		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Perangkat Daerah
5	1	3	2:03	3		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Monitoring pelaksanaan pembangunan sub bidang Infrastruktur	Laporan	5	1	3	2:03	3		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Perangkat Daerah
							Jumlah Dokumen Evaluasi pelaksanaan Pembangunan sub bidang Infrastruktur	Dokumen									
5	1	3	2:03	4		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Kegiatan	5	1	3	2:03	4		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Laporan
5	1	3	2:03	5		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Program yang mendukung prioritas pembangunan daerah Bidang Kewilayahan	Program	5	1	3	2:03	5		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen
5	1	3	2:03	6		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Program pembangunan daerah Bidang Kewilayahan	Program	5	1	3	2:03	6		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	Perangkat Daerah
5	1	3	2:03	7		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Monitoring pelaksanaan Pembangunan sub bidang Kewilayahan	Laporan	5	1	3	2:03	7		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	Perangkat Daerah
							Jumlah Dokumen Evaluasi pelaksanaan Pembangunan sub bidang Kewilayahan	Dokumen									
5	1	3	2:03	8		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Kegiatan	5	1	3	2:03	8		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Laporan

5	1	3	2:01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase capaian program pembangunan daerah sub bidang Pemerintahan	Persen	5	1	3	2:01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase capaian program pembangunan daerah sub bidang Pemerintahan	Persen
						Persentase capaian program pembangunan daerah sub bidang Sosial	Persen							Persentase capaian program pembangunan daerah sub bidang Sosial	Persen
						Persentase capaian program pembangunan daerah sub bidang Kebudayaan	Persen							Persentase capaian program pembangunan daerah sub bidang Kebudayaan	Persen
5	1	3	2:01	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Program yang mendukung prioritas pembangunan daerah Bidang Pemerintahan	Program	5	1	3	2:01	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Dokumen
5	1	3	2:01	2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Program pembangunan daerah bidang Pemerintahan	Program	5	1	3	2:01	2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Perangkat Daerah
5	1	3	2:01	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring pelaksanaan pembangunan sub bidang Pemerintahan	Laporan	5	1	3	2:01	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Perangkat Daerah
						Jumlah Dokumen Evaluasi pelaksanaan Pembangunan sub bidang pemerintahan	Dokumen								
5	1	3	2:01	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Kegiatan	5	1	3	2:01	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMMD pada Bidang Pemerintahan	Laporan
5	1	3	2:01	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Program yang mendukung prioritas pembangunan daerah Sub Bidang Sosial	Program	5	1	3	2:01	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sosial yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen
						Jumlah Program yang mendukung prioritas pembangunan daerah Sub Bidang Kebudayaan	Program							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kebudayaan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen
5	1	3	2:01	6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Program pembangunan daerah Sub Bidang Sosial	Program	5	1	3	2:01	6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Sosial	Perangkat Daerah
						Jumlah Program pembangunan daerah Sub Bidang Kebudayaan	Program							Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kebudayaan	Perangkat Daerah
5	1	3	2:01	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Monitoring pelaksanaan Pembangunan sub bidang Sosial	Laporan	5	1	3	2:01	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Sosial	Perangkat Daerah
						Jumlah Dokumen Evaluasi pelaksanaan pembangunan sub bidang Sosial	Dokumen								Perangkat Daerah
						Jumlah Laporan Monitoring pelaksanaan Pembangunan sub bidang kebudayaan	Laporan							Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kebudayaan	Perangkat Daerah
						Jumlah Dokumen Evaluasi pelaksanaan pembangunan sub bidang kebudayaan	Dokumen								Perangkat Daerah
5	1	3	2:01	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Bidang Sosial	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Bidang Sosial	Kegiatan	5	1	3	2:01	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Bidang Sosial	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMMD pada Bidang Sosial	Laporan
						Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Bidang Kebudayaan	Kegiatan							Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMMD pada Bidang Kebudayaan	Laporan

5	5					PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			5	5					PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		
5	5	2				PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Jumlah rekomendasi hasil kajian	Rekomendasi	5	5	2				PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Jumlah rekomendasi hasil kajian	Rekomendasi
5	5	2	2:02			Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah dokumen kajian Bidang Sosial dan Kependudukan	Dokumen	5	5	2	2:02			Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah dokumen kajian Bidang Sosial dan Kependudukan	Dokumen
5	5	2	2:02	6		Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah kegiatan kajian Bidang Aspek-Aspek Sosial	Kegiatan	5	5	2	2:02	6		Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Dokumen
5	5	2	2:03			Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah dokumen kajian bidang ekonomi dan pembangunan	Dokumen	5	5	2	2:03			Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah dokumen kajian bidang ekonomi dan pembangunan	Dokumen
5	5	2	2:03	4		Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah kegiatan kajian Perindustrian dan perdagangan	Kegiatan	5	5	2	2:03	4		Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Dokumen
5	5	2	2:04			Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah dokumen kajian pengembangan inovasi dan teknologi	Dokumen	5	5	2	2:04			Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah dokumen kajian pengembangan inovasi dan teknologi	Dokumen
5	5	2	2:04	4		Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Kegiatan	5	5	2	2:04	4		Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Laporan
5	1	1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (SPESIFIK LAYANAN PERANGKAT DAERAH)	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (SPESIFIK LAYANAN PERANGKAT DAERAH)	Persen	5	1	1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (SPESIFIK LAYANAN PERANGKAT DAERAH)	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (SPESIFIK LAYANAN PERANGKAT DAERAH)	Persen
5	1	1	2:01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Nilai	5	1	1	2:01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Nilai
5	1	1	2:01	1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	1	1	2:01	1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen
5	1	1	2:01	2		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA yang disusun	Dokumen	5	1	1	2:01	2		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen
5	1	1	2:01	3		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA yang disusun	Dokumen	5	1	1	2:01	3		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen
5	1	1	2:01	4		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA yang disusun	Dokumen	5	1	1	2:01	4		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen
5	1	1	2:01	5		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA yang disusun	Dokumen	5	1	1	2:01	5		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen
5	1	1	2:01	6		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	Laporan	5	1	1	2:01	6		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan
5	1	1	2:02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan keuangan berbasis akrual	Laporan	5	1	1	2:02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan keuangan berbasis akrual	Laporan
5	1	1	2:02	1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan tunjangan PNS	Org/Bulan	5	1	1	2:02	1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Org/Bulan
5	1	1	2:02	7		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Laporan	5	1	1	2:02	7		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan
5	1	1	2:03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Aset Milik Daerah di Bappeda	Laporan	5	1	1	2:03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Aset Milik Daerah di Bappeda	Laporan
5	1	1	2:03	6		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah di Bappeda	Laporan	5	1	1	2:03	6		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan
5	1	1	2:05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur Bappeda yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi	Persen	5	1	1	2:05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur Bappeda yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi	Persen
5	1	1	2:05	1		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	5	1	1	2:05	1		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit
5	1	1	2:05	3		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Pendataan dan Pengolahan Pegawai	Org	5	1	1	2:05	3		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen

5	1	1	2:06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase unit kerja internal Bappeda yang terlayani	Persen	5	1	1	2:06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase unit kerja internal Bappeda yang terlayani	Persen
5	1	1	2:06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat listrik dan komponen listrik yang diadakan	Tahun	5	1	1	2:06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket
5	1	1	2:06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	5	1	1	2:06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket
5	1	1	2:06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Pegawai yang mendapatkan makanan dan minuman harian dan rapat	Org	5	1	1	2:06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket
5	1	1	2:06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan	Bulan	5	1	1	2:06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket
5	1	1	2:06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan	Bulan	5	1	1	2:06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen
5	1	1	2:06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah penyediaan paket ATK	Paket	5	1	1	2:06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket
5	1	1	2:06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kegiatan yang dilakukan	Kegiatan	5	1	1	2:06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan
5	1	1	2:08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Perangkat Daerah yang disediakan	Persen	5	1	1	2:08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Perangkat Daerah yang disediakan	Persen
5	1	1	2:08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materi yang disediakan	Lembar	5	1	1	2:08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan
						Jumlah surat melalui jasa pengiriman	Kali								
5	1	1	2:08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Kubikasi pemakaian air	Meter Kubik	5	1	1	2:08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan
						Jumlah Kwh yang terpakai	Kwh								
						Jumlah pemakaian Data Internet	Jaringan								
5	1	1	2:08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	Unit	5	1	1	2:08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan
5	1	1	2:08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Pelayanan Umum Kantor	Org	5	1	1	2:08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan
5	1	1	2:09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu untuk Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tahun	5	1	1	2:09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu untuk Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tahun
5	1	1	2:09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	5	1	1	2:09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit
5	1	1	2:09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	5	1	1	2:09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit
5	1	1	2:07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Paket	5	1	1	2:07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Paket
5	1	1	2:07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dibangun	Paket	5	1	1	2:07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit